**POLITIK HUKUM PEMIDANAAN KASTRASI:
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**
***THE POLITICAL CRIMES OF KASTRASI:
A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE***

Irene Widiyaningrum

Kejaksaan Agung Republik Indonesia
E-mail : irene.ningrum@yahoo.co.id

Irwansyah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: irwansyah@unhas.ac.id

Naskah diterima : 26/10/2017; direvisi : 23/12/2017; disetujui : 28/12/2017

Abstract

Do not be denied it is the evil of sexual violence against children such as this not only in Indonesia but also in other countries. Certain numbers of these crimes often become dark number. Cases of sexual violence against children who repeatedly to signal the big weakness of this nation in protecting the assets of the future. For that the government sought to do a breakthrough punishment that his nature Ultimum Remedium against sexual crimes cases. Some countries embraced the punishment eunuchs. Seen the mistake in the taking of political law related to it. The solution to political law the government more useful, then law enforcement agencies as the law enforcement agencies have been necessarily believe and implement what has become the policy of the government. On the other hand is not despite the need for the government to immediately realize the follow-up to the terms of the implementation of the punishment from the eunuchs so clearly how the procedure for the execution of eunuchs, who executor, how the financing and the most important thing is the recovery efforts for the victims of that require special handling.

Key Words : sexual crimes, legal policy criminal eunuchs, kastrasi

Abstrak

Tidak bisa dipungkiri memang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga banyak terjadi di negara-negara lainnya. Angka pasti tentang kejahatan ini seringkali menjadi *dark number*. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berulang menjadi sinyal akan kelemahan besar bangsa ini dalam melindungi aset masa depan itu. Untuk itu pemerintah berupaya untuk melakukan terobosan pemberian hukuman yang sifatnya *Ultimum Remedium* terhadap kasus kejahatan seksual tersebut. Beberapa Negara menganut hukuman kebiri. Terlihat adanya kesalahan dalam pengambilan politik hukum terkait hal tersebut. Solusinya agar politik hukum pemerintah lebih bermanfaat, maka aparat penegak hukum selaku penegak undang-undang sudah semestinya mengamini dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan

pemerintah. Di lain sisi tidak terlepas perlunya pemerintah untuk segera merealisasikan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari hukuman kebiri sehingga jelas bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman kebiri tersebut, siapa pelaksana eksekutornya, bagaimana pembiayaannya dan yang terpenting adalah upaya pemulihan terhadap para korban yang memerlukan penanganan khusus.

Kata Kunci : kejahatan seksual, politik hukum, pidana kebiri, kastrasi

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual saat ini membuat masyarakat menjadi resah terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak perempuan. Kisah bocah kecil Angelina yang awalnya dikabarkan hilang dan pada akhirnya diketemukan telah terkubur di samping kandang ayam dengan kondisi telanjang.¹ Diketahui sebelum menjelang kematiannya, bocah malang tersebut telah mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Kemudian muncul lagi kasus pemerkosaan ramai-ramai yang menimpa anak SMP di Bengkulu yang berujung dengan kematian anak perempuan tersebut.² Terakhir, terbongkarnya kasus media online yang menyediakan tayangan untuk paedofilia yang dikenal dengan *Loly candy.com* di mana di dalamnya terdapat banyak konten tanyangan kekerasan seksual anak khususnya anak perempuan dari usia 2 tahun hingga 10 tahun.³ Mirisnya lagi para anggota dalam media tersebut saling berbagi video kekerasan seksual yang bahkan mereka lakukan sendiri terhadap anak-anak tersebut dan dilakukan bukan pada korban yang sama namun pada anak yang berbeda pada tayangan setiap videonya. Sungguh

ironis sekali, belum banyak korban yang melaporkan diri sebagai korban meski sudah dipastikan banyak sekali anak yang menjadi korban.

Tidak bisa dipungkiri memang kejahatan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun juga banyak terjadi di negara-negara lainnya. Angka pasti tentang kejahatan ini seringkali menjadi *dark number*. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain keengganan untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, adanya tekanan dari pihak luar atau dapat juga karena faktor merasa malu sebab kejadian tersebut dapat dipandang sebagai aib yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh didengar oleh orang lain. Bahwa kejahatan seksual tidak sebatas sebagai keniscayaan, kejahatan seksual juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling rumit pengungkapannya. Termasuk kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya. Hal yang wajar Indonesia menyebut negaranya yang secara terbuka dan masif menyebut dirinya dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Fakta ini jelas mengguncang kesadaran publik tentang betapa tingginya risiko yang mengancam anak-anak Indonesia. Hal tersebut sekaligus menunjukkan kegagalan masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kewajiban melindungi anak-anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang berulang menjadi sinyal akan kelemahan besar bangsa ini dalam melindungi aset masa depan itu.

Terkait dengan hukuman kebiri tersebut, pemerintah berupaya untuk

¹ Sumber: news.liputan6.com/read/.../fakta-mengerikan-terungkap-di-sidang-pembunuhan-angelina diunggah 30 Maret 2017

² news.detik.com/.../korban-pemerkosaan-di-bengkulu-anak-perempuan-satu-satunya-d.. diunggah 30 Maret 2017

³ <http://www.dw.com/id/loly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/a-37985355> diunggah 30 Maret 2017.

melakukan terobosan pemberian hukuman yang sifatnya *Ultimum Remedium* terhadap kasus kejahatan seksual tersebut. Tentunya kajian dan analisa telah dilakukan oleh pemerintah hingga akhirnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:⁴

Terkait dengan pidana kastrasi tersebut terdapat pernyataan pro yang muncul dari Arist Merdeka Sirait. Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak, ia mendukung hukum suntik kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan relatif sangat rendah seperti hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bahkan ada beberapa pelaku kekerasan seksual kepada anak dibebaskan. Hal ini menunjukkan kondisi hukum yang lemah bagi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Upaya pemberatan hukuman (suntik kebiri) ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual pada anak dan melindungi masa depan anak-anak dari

predator seksual.⁵ Sebagai bahan kajian ternyata sementara ini penerapan hukuman kebiri sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara di dunia. Negara-negara yang telah memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. antara lain :

Sekalipun sudah menerapkan hukuman kebiri, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Adapun di negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Swedia, Denmark, dan Ceko, para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar. Hasil riset di negara Skandinavia menyatakan penerapan kebiri mengurangi tingkat pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku yang sama hingga 35 %. Di Asia sendiri, kastrasi kimia pertama terhadap pelaku kejahatan seksual diperkenalkan di Korea Selatan empat tahun silam. Di bawah payung hukum yang berlaku di sana, kejahatan seks terhadap anak di bawah usia 16 tahun bisa dihukum kebiri kimia.⁶

Di sisi lain pendapat disampaikan oleh ahli medis. Para ahli medis menyatakan kebiri kimia mesti dilakukan berulang kali. Selain itu, bisa juga menimbulkan efek samping. Kasus di Australia Barat menunjukkan bahwa pemberian obat penekan libido bisa mengakibatkan penyakit osteoporosis, jantung, dan pembesaran payudara. Mencermati pemberlakuan pidana kebiri di negara-negara lain, Indonesia agaknya mempertimbangkan untuk diterapkan bagi pelaku pedofilia. Namun, pengebirian masih menjadi perdebatan bagi

5

<http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri-diunggah-minggu-tgl-23-april-2017>

6

Op.cit.
<http://www.hukumpedia.com/agungh28/...>

⁴nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri diunggah tanggal 5 April 2017

pegiat hak asasi manusia. Proses pemandulan membuat hak para pelaku kejahatan seksual memiliki keturunan terhapus.⁷

Berbeda dengan para pro kastrasi, reaksi menolak hukuman kebiri muncul karena adanya pandangan bahwa hukuman kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Reaksi Kontra antara lain disampaikan oleh Jaringan masyarakat sipil perlindungan korban yang terdiri dari 33 LSM dan lembaga advokasi menolak hukuman kebiri karena melanggar HAM. Ninik menuturkan, pemberian hukuman dengan menyuntikkan zat kimia untuk mengurangi daya seksualitas pelaku kejahatan anak melanggar HAM. Menurutnya hukuman kebiri belum tentu mengurangi ancaman kekerasan seksual pada anak, karena akibatnya pelaku akan melakukan kekerasan dalam bentuk lain seperti memukul atau menyakiti dengan menggunakan benda lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Ninik selaku Direktur Institut Pemberdayaan Anak dan Perempuan Indonesia yang disampaikan dalam diskusi terbatas pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015. Hal senada disampaikan pula oleh Anggara dari Institute for Criminal Justice Reform juga menolak adanya penerapan kebiri, karena menurutnya penerapan kebiri karena hukuman itu tidak menghasilkan kesembuhan bagi pelaku, bila memang terdapat kelainan hormon. Bahkan, pemberian hukuman kebiri pada pelaku pun tidak menjamin pemulihan psikologis pada korban kekerasan seksual. Keduanya meminta pemerintah untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait dengan penerapan hukuman kebiri dan meminta pemerintah untuk menggantinya dengan penerapan efek jera yang disertai pemulihan kondisi pelaku dan korban kejahatan seksual.⁸

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

Reaksi keras pelarangan kastrasi juga muncul dari Amnesty Internasional.⁹ Mereka meminta pemerintah Indonesia harus segera mencabut perubahan terhadap Perppu No. 1/2016 – revisi Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang menerapkan hukuman kebiri kimia kepada mereka terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam situasi yang lebih memberatkan. Amnesty International menganggap bahwa dengan mengesahkan Perppu ini, Pemerintah Indonesia merendahkan hak-hak asasi dasar atas integritas fisik dan mental, khususnya hak untuk tidak mengalami penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Perppu ini juga memperluas cakupan hukuman mati, yang bertentangan dengan standar-standar internasional, yang berlaku bagi beberapa kejahatan seksual terhadap anak.¹⁰ Pada 25 Mei Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) No.1/2016 yang mengamandemen UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak setelah terjadinya beberapa kasus perkosaan terhadap anak yang mendapat perhatian publik luas dan diikuti oleh seruan dari para politisi untuk memperberat hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan

⁹ Amnesty International adalah sebuah organisasi non pemerintah yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas atas nama hak asasi manusia di seluruh dunia. Amnesty International telah berjuang untuk hak asasi manusia sejak tahun 1961 dan merupakan kekuatan utama di balik kampanye menulis surat, pawai, dan upaya terkoordinasi lainnya. Sumber: www.amazine.co › Sosbud › Politik > Apa Amnesty International? Fakta, Sejarah & Informasi Lain diunggah 15 April 2017

¹⁰ suarajakarta.co/.../hukum/amnesty-international-hukuman-kebiri-merendahkan-marta) diunggah 17 April 2017

kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Menurut Amnesty Internasional, Hukuman kebiri kimia melanggar hukum internasional akan larangan tindak penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagai mana yang di atur oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah negara pihaknya. Menerapkannya lewat sebuah undang-undang tanpa persetujuan sebagai sebuah bentuk sanksi hukum merupakan sebuah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Lebih lanjut, tindakan ini memerlukan para dokter atau tenaga medik professional untuk melakukannya di luar kerangka penilaian medik dan etika professional. Amnesty International berpendapat penerapan “hukuman kebiri kimia” Amnesty International percaya ini merupakan sebuah upaya “perbaikan singkat” yang mengalihkan perhatian terhadap reformasi legal dan kebijakan yang lebih rumit bahwa Pemerintah Indonesia harus menghadirkan upaya penyelesaian yang lebih efektif atas masalah kejahatan seksual, termasuk terhadap anak. Amnesty International menentang kejahatan-kejahatan seksual, termasuk terhadap anak, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengakhiri kejahatan tersebut.¹²

Selain itu disisi lain pandangan kontra juga disampaikan oleh Komnas Perempuan yang menilai pengesahan Perppu Perlindungan Anak menjadi UU yang

memuat hukuman kebiri ini merupakan langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan menyatakan hukuman kebiri juga tak memiliki korelasi dengan penurunan angka kekerasan seksual, untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas hukuman itu setelah Perppu Perlindungan Anak disahkan menjadi UU. Di lain pihak terkait dengan pemberlakuan Perpu 1 tahun 2016, IDI telah mengeluarkan surat tertanggal 9 Juni 2016 yang meminta agar dokter tidak menjadi eksekutor dari Perppu 1 Tahun 2016 yang memuat tindakan kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kodekteran Indonesia (Kodeki). IDI juga menyatakan bahwa atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. IDI juga meminta supaya pemerintah mencari solusi lain selain penggunaan kebiri kimia yang sekali lagi dianggap tidak efektif dalam kasus kekerasan seksual. Pihak IDI juga menyatakan bersedia untuk memaparkan pandangan ilmiah dan etikanya tersebut di hadapan Presiden.¹³

Politik Hukum Ketentuan Pidana Kebiri di Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum yang dalam bahasa Belanda disebut “*rechtspolitik*”. Istilah ini tidak berbeda dengan istilah hukum politik atau “*politie recht*”, karena keduanya memiliki

¹¹

nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/in
i.isi.lengkap.perppu.kebiri diunggah 7 April 2017

¹²

(suarajakarta.co/.../hukum/amnesty-
international-hukuman-kebiri-merendahkan-
marta) diunggah 20 April 2017

¹³

nasional.kompas.com/.../idi.tolak.jadi.eksekutor.huk
uman.kebiri.pukulan.telak.bagi.p diunggah 6 Maret
2017

konotasi yang berbeda.¹⁴ *Recht* diartikan sebagai hukum sedangkan *politie* mengandung arti beleid yang berarti kebijakan.

Sedangkan secara terminologis, politik hukum didefinisikan beragam. Antara lain didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁵ Definisi tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan menambahkan pengertian Politik Hukum adalah menjadi kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.¹⁶ Sarjana lainnya mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷ Sedangkan menurut Abdul Halim Garuda Nusantara, menyebutk politik hukum dengan politik hukum nasional yang didefinisikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan

dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan serta penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya dan meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.¹⁸ Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum (*legal polic*) yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁹ Sehingga dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik benang merah pengertian politik hukum adalah menyangkut tentang pembaharuan hukum dalam bentuk pembangunan hukum dan pemberlakuan hukum atau ketentuan itu sendiri dalam mewujudkan tujuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Muhadar,²⁰ yang menegaskan bahwa politik hukum berkaitan dengan dua hal yang saling berkaitan yaitu pertama, arah pembangunan hukum dan kedua tentang kritik terhadap efektifitas hukum yang telah dibentuk tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan hukum.

Sedangkan pengertian kebiri atau seringkali diistilahkan dengan kastrasi. Kastrasi (*castration*) atau pengebirian adalah operasi pengangkatan organ reproduksi (pria dan wanita). Di masa lampau, kastrasi adalah operasi pengangkatan testis seorang pria.²¹ Kebiri atau yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah kastrasi, sebenarnya telah dipraktikkan sejak lama. Kastrasi pada

¹⁴ Sri soemantri, Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam kehidupan bernegara, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No. 4, September-November 2001, hal. 43.

¹⁵ Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet. II, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

¹⁶ Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hal. 65.

¹⁷ Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 20

¹⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Jakarta : YLBHI, 1988, hal. 20

¹⁹ Amran Suadi, Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No. 357 Agustus 2015, hal. 21

²⁰ Muhadar, Politik Hukum di Indonesia, (Bandung : Alumni, 2006), hal 51

²¹ <http://kamuskesehatan.com/arti/kastrasi/> diunggah 22 April 2017

manusia sendiri memiliki banyak arti namun secara umum diartikan sebagai upaya mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi) pada manusia. Dalam sejarah kastrasi, metode-metodenya telah berkembang seiring penemuan metode baru dengan tidak lagi dilakukan bedah, kecuali pada kepentingan dunia kedokteran.

Pada pria, kastrasi dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, memotong saluran sperma ke arah penis yang kemudian tren dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. *Kedua*, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung skrotum di bawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan istilah orkiektomi. *Ketiga*, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. Saat ini dikenal dua macam hukum kebiri, yaitu kebiri secara fisik dan kimiawi. Perbedaannya jika kebiri secara fisik lebih pada tindakan operasi (memotong testikel), sedangkan kebiri kimiawi yaitu dengan melakukan penyuntikan zat kimia yang dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang.

Namun, rencana pemerintah tersebut terkait pemberatan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak mendapat respon yang berbeda dari masyarakat terutama kalangan pemerhati HAM. Mereka berpendapat hukuman kebiri termasuk kategori pelanggaran HAM. Pasalnya, hukum tersebut mengandung penyiksaan secara fisik maupun psikologis. Namun demikian argumentasinya adalah tindakan pemerintah menerbitkan hukuman kastrasi tidak sepenuhnya salah mengingat dalam HAM sendiri sudah mengalami perkembangan. Perkembangan hak asasi

manusia sebagai sebuah disiplin terjadi karena beberapa hal.²²

Pertama : kajian hak asasi bersifat lintas disiplin. Hak asasi termasuk dalam kajian teori atau konsep demokrasi, negara hukum dan konstitusionalisme. Bahkan dalam hukum, hak asasi dijumpai dalam semua disiplin ilmu hukum, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata dan lainnya. Kedua, meluasnya objek kajian hak asasi hanya terbatas pada *individual and political rights* atau civil and political rights. Kemudian pengertian hak asasi bertambah mencakup hak-hak sosial (*social rights*), hak-hak kesejahteraan (*subsistence rights*), hak-hak sosial (*social rights*), seperti hak-hak masyarakat tradisional. Ketiga, hubungan antara hak asasi dengan negara (pemerintah). Hak asasi awalnya diartikan semata-mata sebagai kewajiban negara (pemerintah) menghormati atau menjunjung tinggi segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Negara dalam hal ini pemerintah dilarang mencampuri hak asasi, kecuali yang berkaitan dengan ketertiban umum (*public order*). Negara wajib menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi. Negara tidak lagi sebagai penjaga hak asasi tetapi sebagai penyelenggara hak asasi. Keempat, perkembangan sumber hak asasi manusia. Semula hanya dipandang sebagai hak alamiah (*natural rights*) namun dalam kenyataannya, sulit menentukan lingkup hak-hak yang bersifat alamiah sebab lingkup hak asasi semakin bertambah berdasarkan dasar teori-teori keilmuan maupun berdasarkan ilmu hukum. Artinya Pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan ketentuan sebagai konsekwensi penegak ketertiban umum dan

²² Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, Persamaan Di Hadapan Hukum Dan Pemerintahan, Jurnal Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 359 Oktober 2015 (ISSN 0215-0247), hal 18.

termasuk menegakkan hak-hak asasi manusia.

Pidana kebiri sebagaimana ketentuan Perppu No. 1/2016 juga memperluas cakupan hukuman mati sebagai bentuk penghukuman terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi yang memberatkan, seperti yang diatur oleh Pasal 81. Perluasan hukuman mati oleh Pemerintah Indonesia ini bisa memiliki tujuan untuk menunjukan “ketegasan” mereka merespon kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pada 25 Mei Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) No.1/2016 yang mengamandemen UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak setelah terjadinya beberapa kasus perkosaan terhadap anak yang mendapat perhatian publik luas dan diikuti oleh seruan dari para politisi untuk memperberat hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³ Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:²⁴

²³

nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/in
i.isi.lengkap.perppu.kebiri diunggah 7 April 2017

²⁴ Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**")
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**")
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81 dari Perppu No.1/2016 menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai pemberatan atau penambahan hukuman bagi “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”.

Menurut Perppu ini hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk “jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Para pelaku anak (yang berusia di bawah 18 tahun) dikecualikan dari hukuman kebiri kimia tersebut.

Pemberlakuan ketentuan pidana kebiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menarik untuk dikaji, terutama dari aspek politik hukum. Politik hukum yang dimaksud adalah mencakup implementasi politik hukum yang meliputi:²⁵

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada terutama penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Pembangunan hukum tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan struktur, substansi dan budaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan sejalan dengan tujuan hukum nasional. Dua aspek tersebut seharusnya berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia.

Sehingga seharusnya politik hukum terkait dengan pidana kebiri tersebut dalam tataran idealita hukum harus terkait dengan pengharapan ataupun ekspektasi dan cita-cita hukum nasional. Namun dalam tataran realita ternyata terdapat kesejangan karena faktanya terbitnya ketentuan pidana kebiri

²⁵ Rumadi Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS. 2001, hal. 39

tidak sejalan dengan pemberlakuan hukum itu sendiri, karena sarat dengan kontroversi. Terlihat adanya kesalahan dalam pengambilan kebijakan terkait hal tersebut. Dari beberapa berita dan melihat perjalanan panjang lahirnya ketentuan pidana kebiri dapat dilihat hal-hal yang mempengaruhi adanya kurang atau gagalnya politik hukum yang diambil yaitu :

1. Kurangnya analisa atau kajian dalam perumusan ketentuan sehingga ketentuan yang telah diundangkan hanya menjadi hiasan dan tidak dapat diterapkan.
2. Tindakan pemerintah yang lambat merespon reaksi atas terbitnya ketentuan pidana kebiri, menjadikan produk pemerintah berupa kebijakan hukum menjadi tidak bernilai dan jauh dari cita-cita hukum sebelumnya.

3. Solusi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Gustav Radbruch dalam tesisnya menyebutkan bahwa tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kegunaan (*zweckmabigkeit*). Dengan tidak adanya ketiga unsur ini, jika tidak ada hukum maka seperti tidak ada sosok pria, pesawat terbang tanpa awak, atau anak ayam kehilangan ibu mereka. Namun sejauh mana kemungkinan hukum dapat melangkah untuk memenuhi tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dari negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.²⁶ Untuk itu negara melalui alat pemerintahannya melakukan politik hukum berupa pembaharuan hukum pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi yang utama dalam stelsel sanksi

pidananya, disamping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan baik praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku pidana pencabutan kemerdekaan, pada kenyataannya pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada.²⁷ Namun demikian pada prinsipnya, hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial terhadap pidana jelas ditujukan sebagai salah satu alat untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul dalam menentukan sanksi pidana adalah terletak pada memilih dan menetapkan pidana apa yang paling tepat, sebab seperti yang dikatakan oleh Bentham "*punishment ought not to be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficacious*". Sehingga untuk menghadapi perkembangan delik-delik baru, perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang sesuai dengan hakikat permasalahannya. Dengan mengamati masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat/modernisasi itu sendiri.²⁸ Untuk menilai tepat atau tidaknya kastrasi diterapkan, terdapat 9 kajian pertimbangan terhadap hukuman kebiri yaitu :²⁹

1. Mungkinkah hukuman Kebiri untuk Pemerkosa?

Jawabnya mungkin saja karena kebiri merupakan hukuman berat yang layak dijatuhkan kepada pemerkosa agar

²⁶ Aidir Amin Daud, Disparity in Human Rights Violations : A Political and International Law Perspective, HALREV Vol. 2 Issue Desember 2016, hal 357-358

²⁷ Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Urgensi Adanya Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan), Alumni, Semarang : 1998, hal. 77

²⁸ *Ibid.* hal. 131-132

²⁹ http://www.kompasiana.com/kompasiana/9-pertimbangan-hukuman-kebiri-bagipedofil_564effd7ad7e6175092d

9265 diunggah tanggal 20 April 2017.

mereka tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi hukuman kebiri selain menjadi *Ultimum Remedium* juga memberikan dampak deterrence bagi yang lain.

2. Kebiri terhadap Pedofil Bukan Solusi.

Kejahatan seksual terhadap anak tidak semata-mata terjadi karena dorongan libido si pelaku, tetapi melibatkan faktor lain seperti hasrat untuk mendominasi atau mengendalikan pihak lain yang lebih lemah. Tindakan seksual dengan menggunakan alat genital bukanlah satu-satunya pelampiasan dari hasrat si pelaku. Secara a seksual, pengidap pedofilia dapat meluapkan penyimpangan untuk melecehkan dan menciderai anak-anak. Kejahatan seksual terhadap anak tidak tergantung dan dipengaruhi sepenuhnya oleh dorongan libido si pelaku. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan sikap permisif di masyarakat memungkinkan bentuk kekerasan itu terjadi.

3. Efektifkah Kebiri Predator Anak?

Sejalan kemudian, Adrin Ma'ruf pun mempertanyakan hal serupa terkait hukum kebiri. Tulisnya, secara medis, kebiri atau kastrasi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik kimia dan fisik. Teknik kimia dilakukan dengan cara memberikan hormon antiandrogen kepada pelaku pedofil, diharapkan cara ini akan menghambat produksi hormon testosterone, dan diikuti dengan penurunan tingkat libido (hasrat seksual) pedofil. Sedangkan cara fisik, dilakukan melalui metode pembedahan, dengan jalan menghilangkan secara permanen buah zakar atau testis pelaku

kekerasan seksual sehingga tidak terjadi produksi hormon testosterone.

4. Mengebiri (kastrasi) paedofil seharusnya pahami dulu sebelum buat aturan

Ronny Noor memberikan pilihan, bahwa kebiri kimia jauh lebih baik ketimbang kebiri fisik. Berikut lima keuntungan tersebut. Pertama, Pelaku kejahatan seksual yang sudah sadar masih memungkinkan melakukan aktivitas seksualnya setelah mengalami psikoterapi. Kedua, para pelaku kejahatan seksual dapat secara sukarela meminta dikebiri kimia. Ketiga, kebiri kimia lebih realistis dibandingkan dengan kebiri fisik dan pemakaian gelang elektronik. Keempat, berbeda dengan kastrasi fisik, pengaruh obat antilibido dapat berhenti apabila pemberian obat pada kebiri kimia dihentikan. Kelima, tentunya masyarakat akan merasa lega dan lebih aman jika mengetahui bahwa pelaku kejatan seksual sudah dikebiri kimia.

5. Lalu, Kenapa Alat Vital yang Dikebiri?

Muhammad Armand justru bertanya-tanya: "Di mana gerangan kawan-kawan yang memusatkan perhatiannya tentang perkara-perkara mental health?". Sebab problematika perilaku seksual yang menyimpang, jelas soal kesehatan mental dan soal perilaku, dan soal psikologi, sekaligus soal psikiatrik! Bila narkoba memiliki BNN, mengapa perkara pedofilia yang sudah melewati ambang batas kemanusiaan itu, tak disusun draft pembentukan Badan Pencegahan dan Penanggulangan Penderita Pedophilia? Sampai saat ini belum ada informasi akurat akan adanya badan yang mengurus problematika kesehatan masyarakat yang satu ini. Dan pada tiap-tiap peristiwa pelecehan seksual oleh pelaku pedofilia, yang dianggapnya sebagai "seks palsu". Palsu dikarenakan

anak-anak dipaksa-paksa untuk melayani syahwat menggila dari pelaku pedofilia. Sebuah 'penyelenggaraan' hubungan seksual yang aneh-aneh. Jauh dari sewajarnya, dan mengancam organ reproduksi sang korban.

6. Jika Berani Kebiri, Indonesia Hebat!

Disampaikan oleh Giyat Yunianto. Jika pemerintah lamban dalam menerapkan hukuman kebiri, dikhawatirkan akan semakin banyak anak-anak yang dirusak masa depannya oleh para pedofil. Ya, acap kali keraguan akan timbul bila hukuman berat diterapkan. Namun, jika untuk kemaslahatan yang lebih besar, tak ada salahnya hukuman tersebut diterapkan.

7. Kenapa Harus Menolak Kebiri?

Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak. Tidak ada efek yang ilmiah. Korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengebirian merupakan respons yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri juga sebagai upaya Negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan meminta tanggung jawab hukum pelaku pada korban. Ahmad Sofian menemukan fakta, di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri yang dimulai sejak tahun 1980-an. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk medroxy progesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

8. Tepatkah Potong Saraf Libido?

Meldy Muzada Elfa mengutip ucapan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Ia

mengaku masih bingung bagaimana menerapkannya jika wacana tersebut terealisasi. "Saya agak bingung kalau ada obatnya. Katanya di Inggris atau Eropa ada obatnya. Obatnya apa saya juga masih bingung," sambungnya. Dan inilah yang terjadi jika hukum kebiri dilaksanakan: Indonesia memerlukan spesialis bedah saraf (Sp. BS) sub spesialis saraf perifer (saraf tepi) yang banyak. Kenapa? Operasi pemotongan ini sangat rumit, memerlukan waktu operasi yang lama dan biaya yang besar. Bayangkan, jika ahlinya berjumlah di bawah 10 orang, yang dieksekusi per tahunnya mencapai 50-100 orang, maka selain akan merepotkan sekali juga memakan biaya yang tinggi.

9. Tinggikan Pagar untuk Lindungi Anak dari Pedofil

Misi kita adalah mencegah. Begitu kira-kira Angra Bramagara mengingatkan. Selain dampak dari pengebirian, yang berarti pascakejadian, juga ada pernyataan dari beberapa pihak terkait pada prakejadian, yaitu kenapa seseorang itu melakukan kejahatan seksual. Mereka beranggapan bahwa seseorang melakukan hal tersebut karena penyakit jiwa atau fantasi seksual yang menyimpang. Di mana hal inilah yang sebenarnya mesti disembuhkan. Semua orang barangkali sepakat bahwa memang ada sesuatu yang menyimpang dari pelaku kejahatan seksual pada anak itu. Untuk mengobatinya, kita harus tahu dulu siapa-siapa saja orang yang menyimpang itu. Namun, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu punya penyimpangan seksual jika dia tidak memberi tahu sendiri kepada orang lain. Atau mungkin kita tunggu dulu ada kejadian, supaya kita tahu bahwa seseorang tersebut punya perilaku menyimpang. Padahal, kan misi kita ingin mencegah

kejadian itu terjadi? Ibarat rumah, maka hukuman itu merupakan pagarnya.

Bagaimanapun juga ketentuan pidana kebiri sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengganti ketentuan Perlindungan Anak sebelumnya. Pidana kebiri atau diistilahkan dengan Kastrasi memang belum ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Di Indonesia menurut pasal 10 KUHP baru dikenal 4 ketentuan pemidanaan yakni berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, juga ada satu lagi jenis pemidanaan baru menurut UU NO 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan. Didalam literatur per Undang-undangan Indonesia sendiri, ketentuan mengenai kejahatan seksual terhadap anak di atur dalam pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya ketentuan khusus yang mengakomodir kepentingan anak-anak di atur dalam UU NO 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan paling singkat tiga tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Penerapan ketentuan tersebut sejalan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat, dimana kejahatan kekerasan seksual sudah dianggap masih terjadi dan harus dilakukan penegakan hukum. Menurut Cicero (106-43 SM), "*ubi societas ubi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat disitulah hukum berada". Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan sebaliknya, namun lebih baik disebutkan bahwa hukum itu terdiri dari jiwa dan karakter masyarakat. Namun faktanya hukum lebih lambat mengikuti perkembangan masyarakat. Situasi tersebut memunculkan adagium " hukum itu bukan masyarakat " (*law is not society*). Jelas hal ini menjadi masalah dasar dari

pembentukan undang-undang yaitu mengaplikasikan ketentuan lokal dalam substansi hukum yang ternyata tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakteristik dari struktur hukum juga menjadi problem yang menjadikan kelemahan dalam pembangunan hukum dan juga budaya hukum dimasyarakat.³⁰

Dalam Sistem hukum terkait dengan 3 hal yaitu Struktur, Subtansi dan budaya hukum. Telah diketahui terbitnya ketentuan tentang pidana kebiri berpengaruh pada Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Adanya reaksi dengan terbitnya ketentuan pidana kebiri memperjelas adanya kesenjangan yang menjadi masalah dalam politik hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga diperlukan solusi. Sehingga solusi yang seharusnya ditempuh juga harus terstruktur dalam 3 hal yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu :

1. Struktur

Sejak diundangkan oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini, belum dilakukan penyelesaian aturan pelaksana terkait dengan pidana kebiri. sehingga belum jelas bagaimana prosedur pelaksanaan dari pidana kebiri jika ketentuan tersebut telah diadopsi dalam pembuktian perkara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) padahal eksekutornya belum ditentukan secara jelas. Hal ini terkait adanya penolakan dari IDI selaku pelaksana hukuman (medis). Hal yang sama juga terkait dengan pengaturan tempat dan pembiayaan. Solusinya adalah segera dibuat aturan pelaksana, perlu ketegasan pemerintah

2. Subtansi

3. Aturan pelaksana yang jelas dan penerapan ketentuan tersebut pada tataran praktek.

³⁰ Marthen Arie, An Approach of Legisprudence Theory to Asses the Quality of Local Regulation, HALREV, Vol. 2 : 3 Desember 2016, hal. 371

4. Budaya Hukum, dengan memperbanyak sosialisasi terkait ketentuan sehingga selain menambah wawasan masyarakat sekaligus memberikan peringatan kepada calon pelaku akan akibat yang akan ditanggung jika melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga fungsi hukum yang dapat memberikan efek deterrence dapat berlaku.

5. Pemidanaan Kastrasi di beberapa negara

1. *Amerika Serikat*

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual.

2. *Australia*

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi

libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

3. *Korea Selatan*

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan hukuman kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan hukum kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri.

4. *Rusia*

Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah hukuman kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

5. *Jerman*

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidanan

pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai hukuman kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu "sedang ditinjau ulang." Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingan. Dan yang paling penting : terpidana bersedia menjalani kebiri kimia.³¹

Pengenaan pidana kebiri merupakan bentuk penegakan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual khususnya korban anak-anak. Penegak hukum identik dengan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan jugdes dan pengacara. Penegakan hukum yang selalu dilakukan di bidang penegakan hukum dan atau masyarakat. Secara sederhana Jimly Assidique menyebutkan bahwa penegak hukum adalah proses melakukan upaya untuk pendirian atau berfungsinya norma hukum di masyarakat. Soerjono soekanto menyebutkan beberapa faktor adalah faktor hukum penegakan hukum, aparat penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam hubungan hukum apapun. Siapa saja yang menjalankan atau normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma hukum yang berlaku, yang berarti dia menjalankan atau menerapkan peraturan hukum. Dalam arti sempit subjek itu, bahwa petugas penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya untuk memastikan penegakan undang-undang tertentu dan memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik. Dalam memastikan supremasi hukum, jika perlu,

aparat penegak hukum diizinkan menggunakan kerja paksa.³²

Upaya pemerintah memasukkan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan tersebut harus mendapat apresiasi meskipun dalam tataran pelaksanaan baru berada diatas kertas saja. Hal itu tidak lain dari bentuk wujud upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan tindakan secara meluas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman yang maksimal berupa pidana kebiri. Agar lebih bermanfaat, aparat penegak hukum selaku penegak undang-undang sudah semestinya mengamini dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tindakan nyata dengan berupa menerapkan ketentuan tersebut dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak pada tahap penyidikan, penuntutan dan vonis merupakan tindakan yang tepat yang bisa dilakukan oleh aparat hukum. Dilain sisi tidak terlepas perlunya pemerintah untuk segera merealisasikan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari hukuman kebiri sehingga jelas bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman kebiri tersebut, siapa pelaksana eksekutornya, bagaimana pembiayaannya dan yang terpenting adalah upaya pemulihan terhadap para korban yang memerlukan penanganan khusus.

Sekilas memang dilihat hukuman kebiri tersebut sebagai suatu jenis pemidanaan yang sadis sepertinya, namun sesungguhnya tidaklah sesadis terhadap apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang telah diperkosanya. Para korban yang telah hancur masa depannya, mereka telah hilang kehormatannya dan mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga pidana kebiri adalah hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku phedofil. Jika kita telisik lebih cermat lagi,

³¹icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/... diunggah Senin 03 Maret 2017

³² La Sina, Implementation Of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia, HALREV Vo. 2 Issue 3 Desember 2016, hal. 388-389

hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku predator seks terhadap anak jangan diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan di buang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Dengan cara itu, pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan mampu meredam hawa nafsu akan kebutuhan seks, karena itu merupakan suatu penyakit.

Latar belakang dengan semakin maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dapat berdampak besar terhadap perkembangan psikis anak. Layak kiranya adanya pemberian hukuman berat dan setimpal terhadap pelaku. Sanksi hukuman penjara yang dinilai sudah tidak relevan lagi dan tidak menimbulkan efek jera dapat terjawab dengan adanya hukuman kebiri yang menjadi pilihan terakhir terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Maka pemberlakuan pidana kebiri sudah sewajarnya dalam konteks teknis hukuman tersebut setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hukuman kebiri. Hal ini bertujuan demi menciptakan lingkungan yang nyaman tempat tumbuh dan berkembangnya anak-anak dan menjamin masa depan anak-anak Indonesia.³³

SIMPULAN

Penerapan hukuman kebiri yang telah diundangkan oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan reaksi dalam masyarakat berupa pendapat pro dan kontra. Mereka yang pro menyatakan bahwa kastrasi tersebut diperlukan dan dianggap sebagai hukuman yang tepat untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengingat ketentuan lama cenderung lemah memberikan perlindungan kepada korban

kekerasan seksual anak yang semakin banyak. Sedangkan mereka yang menyatakan kontra terhadap hukuman kastrasi menyebutkan bahwa tindakan kastrasi tersebut melanggar hak-hak asasi manusia dan dianggap tidak efektif mengingat belum ada bukti turunnya angka kejahatan seksual terhadap anak dengan diterapkannya pidana kebiri.

Upaya pemerintah memasukkan pidana kebiri sebagai bentuk politik hukum pemerintah dalam melakukan tugasnya penegak ketertiban umum dan termasuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut harus mendapat apresiasi meskipun dalam tataran pelaksanaan baru berada diatas kertas saja. Hal itu tidak lain dari bentuk wujud upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan tindakan secara meluas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman yang maksimal berupa pidana kebiri. Agar lebih bermanfaat, aparat penegak hukum selaku penegak undang-undang sudah semestinya mengamini dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tindakan nyata dengan berupa menerapkan ketentuan tersebut dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak pada tahap penyidikan, penuntutan dan vonis merupakan tindakan yang tepat yang bisa dilakukan oleh aparat hukum. Di lain sisi tidak terlepas perlunya pemerintah untuk segera merealisasikan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari hukuman kebiri sehingga jelas bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman kebiri tersebut, siapa pelaksana eksekutornya, bagaimana pembiayaannya dan yang terpenting adalah upaya pemulihan terhadap para korban yang memerlukan penanganan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, B. *Persamaan Di Hadapan Hukum Dan Pemerintahan*, Jurnal Varia

33

<http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri> diunggah 23 april 2017

Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 359 Oktober 2015.

Hukum Tahun XXX No. 357 Agustus 2015

Muhadar, *Politik Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Semarang : 1998

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta : YLBHI, 1988)

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Wahid, Rumadi Marzuki, Fiqh Mazhab Negara : *Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS. 2001

Wahyono ,Padmo, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29, April 1991

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986

Sina, L. (2016). Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 385-397. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v2i3.695>

Jurnal

Daud, A. (2016). Disparity in Human Rights Violations: A Political and International Law Perspective. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 349-361. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v2i3.697>

Soemantri, Sri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam kehidupan bernegara*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No. 4, September-November 2001

Suadi, Amran, *Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Varia Peradilan Majalah